**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2016 – 2021 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode Tahun 2016 - 2021. Arah pembangunan dapar dilihat dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **‘Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”** yang dideskripsikan sebagai berikut:

* **MAJU** berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.
* **ADIL** berarti kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.
* **MAKMUR** berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
* **BERMARTABAT** berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.
* **BERKUALITAS** berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkupan hidup.

Selanjutnya, untuk mewujudkan tercapainya Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.
8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi.

Selanjutnya, dalam rangka menjabarkan Visi, Misi, serta Tujuan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode satu tahun, maka perlu dituangkan kedalam suatu sistem perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2016- 2021 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017.

Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi dan misi yang akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapainya dalam Tahun 2017. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga istilah Perjanjian Kinerja masih menggunakan istilah Penetapan Kinerja. Adapun Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat mengambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi.

**Tabel. 2.1 Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISI** | **TUJUAN** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET AKHIR RPJMD**  **2021** |
| **MISI I** | **TUJUAN 1** | **Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan konektivitas** | Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik | 80,10 |
|  |  | **Menurunnya luasan kawasan pemukiman kumuh melalui pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas** | Luasan kawasan pemukiman kumuh | 0 H2 |
|  |  | **Terdapatnya aksesbilitas dan pelayanan air bersih sampai ke daerah** | Persentase kecamatan mendapatkan aksesbilitas /terlayani air bersih | 100% |
|  |  | **Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olah raga** | Jumlah gedung dan lapangan olah raga yang memenuhi standar nasional | 2 |
|  | **TUJUAN 2** | **Tersedianya kawasan khusus untuk industri dan agro insdustri** | Jumlah industri dan kawasan agroindustri | 100% |
|  |  | **Tersedianya sentra produksi holtikultura dan perikanan** | Jumlah sentra produksi holtikultur dan perikanan | 13 sentra |
|  |  | **Tersedianya kawasan agropolitan / minapolitan** | Jumlah Kawasan agropolitan / minapolitan | 5 kawasan |
| **MISI II** | **TUJUAN 1** | **Meningkatkan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan,pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas** | Persentase SD dan SMP dengan akreditasi B | SD 60%  SMP 70% |
| Angka melek huruf | 98,70 % |
| Angka rata rata lama sekolah | 8,95 % |
| APK SD/ MI/ SDLB | 117,71 % |
| APK SMP/ MTs | 99,02 % |
| APM SD/SDLB/ MI | 99,07 % |
| APM SM/MTs | 64,45 % |
|  |  | **Meningkatnya kualitas tenaga kerja melalui pendidikan / pelatihan** | Besaran tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan | 1572 orang |
|  | **TUJUAN 2** | **Meningkatkan aksesbilitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan** | Jumlah RS terakreditasi | 1 RS |
| Persentase puskesmas yang ditingkatkan dari non PRI menjadi PRI | 100% |
| Rasio bidan per 100.000 penduduk | 95 per 100.000 penduduk |
| Rasio perawat per 100.000  Penduduk | 95 per 100.000 penduduk |
| Rasio dokter umum per 100.000 penduduk | 25 per 100.000 penduduk |
| Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk | 9 per 100,000 penduduk |
| Rasio puskesmas per 30.000 penduduk | .1,7 per 30.000 penduduk |
| Rasio puskesmas perawatan / 30.000 penduduk | 1,7 per 30.000 penduduk |
| Rasio dokter spesialist per 100.000 penduduk | 6 per 100.000 penduduk |
| Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk | 1 per 100.000 penduduk |
|  |  | **Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat** | Indeks kepuasan pelanggan | 4 |
|  |  | **Meningkatkan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular** | Prevalensi kekurangan gizi pada balita | 18% |
|  | **TUJUAN 3** | **Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam da n kelestarian lingkungan hidup** | Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga SDA dan pelestarian lingkungan | 65% |
|  |  | **Menurunkan dampak lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam** | Persentase kegiatan / usaha yang memanfaatan sumber daya alam sesuai peraturan | 96% |
|  |  | **Meningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem** | Jumlah kearifan lokal menjaga keberlanjutan ekosistem yang dilestarikan | 10 |
| **MISI III** | **TUJUAN 1** | **Meningkatan investasi daerah** | Nilai investasi | 19,8 trilyun |
|  | **Meningkatan daya serap tenaga kerja** | tingkat partisipasi angkatan kerja | 70.20 |
| Tingkat pengangguran terbuka | 1,32% |
| **TUJUAN 2** | **Meningkatan daya saing agroindustri dan perikanan** | Nilai ekspor agroindustri | 18.000.000,00 |
|  |  |  | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan | 1.099.759 kg |
|  |  | **Meningkatakan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan** | Jumlah koperasi aktif | 249 |
| Jumlah UMKM berkelanjutan | 245 |
|  |  | **Meningkatkan kesejahteraan pekerja untuk pengurangan kesengajaan dan kemiskinan** | Upah minimun kabupaten | 2.682.132,44 |
| Indeks gini rasio | 0,30 |
| Persentase perusahaan yang mengikuti UMK | 100 |
|  |  | **Meningkatkanproduk lokal yang terdaftar legalitasnya** | Persentase produk lokal yang terdaftar legelitasnya | 80% |
|  |  | **Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah** | Persentase pemasaran produk unggulan daerah ke pasaran | 85% |
|  |  | **Berkembangnya potensi wisata agar menjasi objek wisata yang dikenal luas masyarakat** | Jumlah potensi wisata yang dikembangkan menjadi objek wisata terkenal | 3 |
| **MISI IV** | **TUJUAN 1** | **Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya** | Indeks kerukunan umat beragama (KUB kemenag) | 90% |
|  | **TUJUAN 2** | **Meningkatkan kualitas dan jangkuan pelayanan publik** | indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | 85% |
|  |  | **Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan pubik** | Persentase Aparatur pelayanan publik yang memenuhi | 90% |
|  |  | **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah** | Opini laporan keuangan pemerintahan | WTP |
|  |  | **meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah** | Tingkat keselarasan dokumen perencanaan | 100% |
|  |  | **Meningkatnya pelayanan perpustakaan daerah** | Jumlah pengunjung perpustakaan | 48.858 pengunjung |
|  | **TUJUAN 3** | **Meningkatnya kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha** | Peraturan / kebijakan yang jelas dan logis terkait urusan khalayak ramai yang dikeluarkan | 7 |
|  |  | **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (tipe A/B)Kab. Tanjab Barat** | Persentase perangkat daerah(Tipe A/B) dengan akuntabilitas kinerja bernilai B (Nilai Akip Tanjab Barat) | 100% |